

Ketergantungan Energi Dan Posisi Politik Hungaria Dalam Penolakan Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia

Ayu Yosefina Marpaung
Universitas Sriwijaya
ayumarpaung658@gmail.com

Hafiza Adeylie Chantika Arthadeswa
Universitas Sriwijaya
adelicantika19@gmail.com

Abstract - *The European Union has imposed a series of sanctions on Russia in response to various actions deemed to violate international law and threaten regional stability. However, amid the EU's efforts to maintain unity in facing Russian aggression, Hungary has taken a different stance. Under the leadership of Prime Minister Viktor Orbán, Hungary has consistently opposed several EU sanctions against Russia and maintained economic and energy relations with Moscow. This stance not only creates tensions within the EU but also sparks criticism regarding Hungary's commitment to European solidarity. The aim of this study is to analyze the factors behind Hungary's opposition of EU sanctions against Russia. This research employs a qualitative method with a literature review approach. Data is collected from various sources such as books, academic journals, newspapers, and official documents. The results show that Hungary oppose the EU's sanctions against Russia due to its high dependence on Russian gas, oil, and nuclear energy in order to maintain economic stability and energy security. This stance provides short-term economic benefits but also creates tensions with the EU. Hungary's close relationship with Russia strengthens its position within the EU but also weakens the effectiveness of sanctions against Moscow.*

Keywords: *European Union, Hungary, Russia, Dependency Theory*

Abstrak - Uni Eropa telah memberlakukan serangkaian sanksi terhadap Rusia sebagai respons terhadap berbagai tindakan yang dianggap melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas kawasan. Namun, di tengah upaya UE untuk menjaga kesatuan dalam menghadapi agresi Rusia, Hungaria justru mengambil posisi yang berbeda. Di bawah

kepemimpinan Perdana Menteri Viktor Orbán, Hungaria secara konsisten menolak beberapa sanksi UE terhadap Rusia dan tetap mempertahankan hubungan ekonomi serta energi dengan Moskow. Sikap ini tidak hanya menciptakan ketegangan dalam internal UE tetapi juga memicu kritik terhadap komitmen Hungaria terhadap solidaritas Eropa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan Hungaria terhadap sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal akademik, surat kabar, dan dokumen resmi terkait. Hasilnya adalah Hungaria menolak sanksi Uni Eropa terhadap Rusia karena ketergantungannya yang tinggi pada impor gas, minyak dan nuklir dari Rusia dan demi menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan energi. Sikap ini memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek tetapi juga memicu ketegangan dengan UE. Hubungan dekat dengan Rusia memperkuat posisi Hungaria di UE tetapi juga melemahkan efektivitas sanksi terhadap Moskow.

Kata Kunci: *Uni Eropa, Hungaria, Rusia, Teori Ketergantungan*

I. PENDAHULUAN

Uni Eropa telah memberlakukan serangkaian sanksi terhadap Rusia sebagai respons terhadap berbagai tindakan yang dianggap melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas kawasan. Sanksi ini pertama kali diperkenalkan setelah aneksasi ilegal Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 dan diperluas secara signifikan setelah invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

UE telah mengadopsi 16 paket sanksi yang mencakup berbagai aspek mulai dari pembatasan perdagangan, pembekuan aset individu dan entitas, larangan perjalanan bagi tokoh-tokoh yang terkait dengan rezim Rusia hingga pemutusan akses Rusia terhadap teknologi dan pasar penting. Selain itu, UE juga telah memberlakukan sanksi terhadap negara-negara yang mendukung agresi Rusia seperti Belarus, Iran dan Korea Utara. Tujuan utama dari sanksi ini adalah untuk melemahkan ekonomi Rusia dan menghambat kemampuannya dalam membiayai perang serta memberikan tekanan politik agar Rusia menghentikan agresinya terhadap Ukraina.

Namun meski UE berupaya menjaga kesatuan dalam menghadapi agresi Rusia, Hungaria sebagai salah satu negara anggota UE justru mengambil posisi yang berbeda. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Viktor Orbán, Hungaria secara konsisten menolak beberapa sanksi UE terhadap Rusia. Negara ini tetap mempertahankan hubungan ekonomi dan energi dengan Rusia bahkan di saat mayoritas negara anggota UE lainnya berusaha mengisolasi Rusia melalui berbagai langkah ekonomi dan diplomatik.

Kedekatan politik dan ekonomi antara Viktor Orbán dan Vladimir Putin telah memunculkan kekhawatiran di antara anggota UE lainnya. Hungaria berulang kali memanfaatkan hak vetonya untuk menghambat keputusan UE yang berkaitan dengan dukungan terhadap Ukraina seperti bantuan finansial dan militer. Sikap Hungaria ini tidak hanya menimbulkan ketegangan dalam internal UE tetapi juga mengundang kritik dari berbagai pihak yang mempertanyakan komitmennya terhadap solidaritas Eropa.

Permasalahan utama yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengapa Hungaria menolak sanksi UE terhadap Rusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan Hungaria terhadap sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kepentingan politik, ekonomi dan diplomatik yang memengaruhi keputusan tersebut serta implikasinya terhadap hubungan Hungaria dengan Uni Eropa dan Rusia.

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini akan memperkaya kajian hubungan internasional khususnya dalam penerapan teori

ketergantungan dalam kebijakan luar negeri. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini dapat memberikan perspektif mengenai bagaimana ketergantungan suatu negara dapat membentuk hubungan dalam organisasi multilateral. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai dinamika internal UE dalam menghadapi ancaman eksternal.

Harapannya penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai dinamika politik dalam UE dan bagaimana sebuah negara anggota dapat memiliki kepentingan mereka masing-masing dalam merancang kebijakan luar negerinya serta dampaknya terhadap efektivitas kebijakan luar negeri UE. Dengan memahami pola kebijakan Hungaria, UE diharapkan dapat menemukan pendekatan yang lebih efektif dalam menjaga hubungan internalnya dan meningkatkan ketahanan terhadap ancaman eksternal. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam memahami alasan domestik dan geopolitik memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara di dalam organisasi internasional.

Teori ketergantungan muncul pada tahun 1960an sebagai reaksi terhadap teori modernisasi. Para pemikirnya terutama dari Amerika Latin mengkritik pandangan modernisasi yang dinilai mengabaikan dampak kolonialisme dan imperialisme dalam membentuk keterbelakangan ekonomi negara-negara berkembang. Teori ini menekankan bahwa hubungan antara negara maju (core) dan negara berkembang (periphery) bersifat tidak seimbang dimana negara berkembang menjadi bergantung pada negara maju dalam sistem ekonomi global yang eksploitatif. Arno Tausch (2010) menjelaskan beberapa karakteristik negara periphery seperti tingginya keterlibatan modal asing, ketergantungan teknologi serta ketergantungan pada ekspor komoditas tertentu.

Theotonio Dos Santos (1970) mendefinisikan ketergantungan sebagai situasi di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh ekspansi ekonomi negara lain yang lebih kuat. Akibatnya negara berkembang sulit mencapai kemajuan secara mandiri karena bergantung pada negara maju. Andre Gunder Frank (1969) menegaskan bahwa keterbelakangan dan kemajuan bukanlah fenomena yang berdiri sendiri melainkan hasil dari hubungan struktural yang menguntungkan sebagian pihak dan merugikan pihak lain.

Teori ketergantungan berakar dari pemikiran strukturalis ekonom seperti Raúl Prebisch dan Hans W. Singer yang mengungkapkan bahwa negara berkembang yang mengandalkan ekspor bahan mentah mengalami kemunduran dalam nilai tukar dibandingkan dengan negara industri yang mengekspor barang jadi. Gagasan ini kemudian diperluas oleh para ekonom Marxis dan neo-Marxis, seperti Paul Baran, Paul Sweezy, dan Arghiri Emmanuel.

Meskipun awalnya berkembang di Amerika Latin, teori ketergantungan juga diterapkan untuk menganalisis situasi di Afrika dan Asia. Fernando Henrique Cardoso dan Enzo Faletto menambahkan bahwa selain faktor eksternal, dinamika internal dalam negara berkembang seperti peran elit yang bersekutu dengan kepentingan asing turut menjadi alasan ketergantungan ekonomi.

Teori ketergantungan dapat digunakan untuk menganalisis keputusan Hungaria dalam penolakannya terhadap sanksi Uni Eropa. Dalam kerangka teori ini, Hungaria dapat dikategorikan sebagai negara *periphery* yang memiliki ketergantungan ekonomi tinggi terhadap Rusia khususnya dalam sektor energi. Sementara itu, Rusia berperan sebagai negara *core* yang memiliki kontrol atas sumber daya energi yang menjadi kebutuhan utama Hungaria.

Hungaria sangat bergantung pada pasokan energi dari Rusia terutama gas alam yang lebih dari 80% kebutuhan domestiknya berasal dari negara tersebut. Ketergantungan ini tidak hanya terbatas pada pasokan energi tetapi juga mencakup infrastruktur dan investasi di sektor energi. Salah satu contoh nyata adalah proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Paks II yang didanai oleh Rusia.

Jika Hungaria mendukung sanksi energi terhadap Rusia, ini akan berdampak terhadap perekonomian domestik seperti lonjakan harga energi dan potensi krisis ekonomi. Ketergantungan ini membuat Hungaria sulit mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan Rusia karena alternatif pasokan energi dalam jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut.

Selain faktor ekonomi, aspek historis dan politik juga berperan dalam keputusan Hungaria. Sejak era Perang Dingin, Rusia telah menggunakan energi sebagai alat geopolitik untuk mempertahankan pengaruhnya atas negara-negara Eropa Timur termasuk Hungaria. Pemerintahan Perdana Menteri Viktor Orbán

dikenal memiliki hubungan erat dengan Rusia dan sering mengambil posisi yang berseberangan dengan Uni Eropa dalam berbagai kebijakan. Hubungan dekat ini semakin memperkuat ketergantungan ekonomi dan politik Hungaria terhadap Rusia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian berjudul *In the EU and NATO but Close to Russia—Post-Crimea Attitudes in Bulgaria and Hungary* ditulis oleh Sten Berglund dan Georgi Karasimeonov pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode analisis data survei dengan memanfaatkan *Post-Crimea Barometer* yaitu survei unik yang mengukur orientasi geopolitik dan sikap terhadap Rusia di Bulgaria dan Hungaria setelah aneksasi Krimea oleh Rusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan jangka panjang dengan Rusia merupakan faktor utama yang menentukan sikap pro-Rusia di Bulgaria, sedangkan di Hungaria perpecahan ini tidak terlalu kuat dalam sistem partai politik di negara tersebut. Baik pendukung maupun penentang Rusia cenderung bernaung dalam partai yang sama yaitu Fidesz dan Jobbik. Di Bulgaria, orientasi geopolitik cenderung lebih terpolarisasi dengan perbedaan yang tajam antara kelompok pro-Rusia dan pro-Uni Eropa, sementara di Hungaria, perbedaan ini tidak terlalu tajam dan lebih dipengaruhi oleh faktor politik domestik. (Berglund & Karasimeonov, 2019)

Penelitian selanjutnya berjudul *Between East and West, Between Past and Future: The Effects of Exclusive Historical Victimhood on Geopolitical Attitudes in Hungary and Serbia* ditulis oleh Ivanović, Vincze, Jevtić, Szabó, Csertó, Choi, dan Liu dan diterbitkan pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan sampel nasional dari Serbia dan Hungaria yang dikategorikan berdasarkan gender, usia, orientasi politik dan tempat tinggal. Analisis dilakukan menggunakan model regresi dan moderated mediation untuk memahami hubungan antara victimhood eksklusif dan sikap geopolitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa victimhood eksklusif berkontribusi pada peningkatan Euroskeptisisme yang pada akhirnya mendorong dukungan terhadap pergeseran geopolitik dari Barat (Uni Eropa dan AS) ke Timur (Rusia dan Cina) di kedua negara. Di Serbia efek tidak langsung ini paling kuat pada responden yang bersikap netral terhadap perang Rusia-Ukraina, sedangkan di Hungaria efek langsung victimhood

eksklusif terhadap pergeseran ke Timur lebih dominan di antara mereka yang pro-Rusia dan tidak signifikan bagi yang pro-Ukraina. (Ivanović et al., 2024)

Penelitian berjudul *Hungary in the European Union–Cooperation, Peacock Dance and Autocracy* yang ditulis oleh Andrea Éltető dan Tamás Szemlér pada tahun 2023 menganalisis bagaimana Hungaria sejak bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004 mengalami pergeseran menuju otoritarianisme terutama setelah tahun 2010. Dengan menggunakan pendekatan analisis politik dan ekonomi serta kerangka teoretis authoritarian equilibrium dari Kelemen, penelitian ini menemukan bahwa rezim otoriter di Hungaria tetap stabil karena tiga faktor utama yaitu politik setengah matang UE dimana kedaulatan nasional masih dominan meskipun ada partai-partai Eropa, transfer dana dari UE yang menopang pemerintahan otoriter, serta emigrasi warga negara yang mengurangi oposisi domestik. Meski tekanan dari UE semakin meningkat dan perang Rusia-Ukraina menjadi guncangan eksternal penelitian ini menyimpulkan bahwa rezim otoriter di Hungaria masih bertahan dan kemungkinan besar akan tetap stabil selama pemerintahan saat ini masih berkuasa. (Éltető & Szemlér, 2023)

Penelitian selanjutnya berjudul *Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina* ditulis oleh Mahfud Massaguni, Muhammad Nasir Badu, dan Muhammad Ashry Sallatu pada 2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (library research), di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dokumen, surat kabar, dan artikel yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap Rusia akibat aneksasi Krimea tidak hanya berdampak pada Rusia, tetapi juga pada Uni Eropa sendiri mengingat hubungan perdagangan yang erat antara kedua pihak. Selain itu sanksi tersebut tidak berhasil mengubah kebijakan Rusia terhadap Ukraina bahkan justru memperkuat nasionalisme di Rusia dan meningkatkan popularitas Presiden Vladimir Putin. (Massaguni et al., 2022)

Penelitian berjudul *Sikap Uni Eropa Terhadap Konflik Rusia dan Ukraina* ditulis oleh Ali Martin dan Salman Al Farizi dan diterbitkan pada 2024. Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data interpretatif. Data yang digunakan mencakup norma, sikap, ideologi, dan pemikiran masyarakat yang dikaitkan dengan fenomena konflik Rusia-Ukraina serta respons Uni Eropa terhadap konflik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Uni Eropa memberikan respons terhadap invasi Rusia ke Ukraina dengan menerapkan sanksi ekonomi, bantuan militer serta dukungan kemanusiaan bagi warga Ukraina. Uni Eropa menargetkan Rusia dengan berbagai paket sanksi seperti pembatasan akses ke pasar modal, embargo energi serta larangan impor dan ekspor barang. Selain itu, UE juga meningkatkan kerja sama militer dengan NATO dan mempercepat bantuan finansial bagi Ukraina. Namun sanksi ini berdampak tidak hanya pada Rusia tetapi juga pada Uni Eropa terutama dalam sektor energi dan perdagangan. Studi ini menyimpulkan bahwa langkah-langkah Uni Eropa bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan Eropa dan menekan agresi Rusia terhadap Ukraina. (Martin & Al Farizi, 2024)

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2012), metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang dapat dideskripsikan, diuji, dikembangkan serta dimanfaatkan dalam memahami dan menyelesaikan suatu permasalahan. Sementara itu, Suryana (2012) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis dalam memperoleh pengetahuan ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikannya sebagai pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang disusun secara rinci.

Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan melalui studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal akademik, surat kabar, dan dokumen relevan lainnya. Penggunaan studi literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Hungaria dengan pendekatan teori ketergantungan dalam hubungan internasional. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana kepentingan nasional berperan dalam kebijakan luar negeri Hungaria.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Politik dan Ideologis

Hungaria, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Viktor Orban, telah menjadi salah satu aktor yang sering menghalangi langkah-langkah Uni Eropa untuk memperketat sanksi terhadap Rusia. Penolakan Budapest tidak hanya menunjukkan kedekatan politiknya dengan Rusia, tetapi juga merupakan bagian dari strategi ideologis Orban untuk memperkuat pengaruhnya di dalam dan luar negeri. Tulisan ini membahas tiga aspek utama dari hal tersebut: Hubungan Orban dengan Rusia, kritik Orban terhadap kebijakan Uni Eropa, dan bagaimana ia membangun dukungan politik di dalam negeri. Pemerintah Viktor Orban secara konsisten menentang kebijakan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, dengan alasan bahwa sanksi tersebut lebih merugikan Eropa daripada Rusia itu sendiri. Dalam sebuah pidato pada November 2024, Orban mengatakan bahwa sanksi-sanksi tersebut “membunuh diri mereka sendiri” dengan menyebabkan hiperinflasi dan krisis energi di Eropa (Spike, 2024). Sikap ini berasal dari hubungan politik dan ekonomi Hongaria yang erat dengan Rusia. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Orban telah melakukan kontak langsung dengan para pejabat senior di Moskow, termasuk pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov (Drohozyuk, 2024). Selain itu, Hongaria telah menggunakan jabatannya sebagai Presiden Dewan Uni Eropa 2024 untuk melobi Brussel untuk mendapatkan pengecualian dari sanksi energi. Salah satu contohnya adalah keberhasilan Budapest dalam mempertahankan impor minyak mentah dari Rusia melalui pipa Druzhba, dengan alasan ketergantungan energi yang besar (Fazekas, 2022). Orban bahkan secara terbuka menyatakan bahwa “tanpa energi dari Rusia, ekonomi Hongaria akan runtuh”, sambil mengkritik kebijakan transisi energi Uni Eropa (Bondarieva, 2025). Sikap ini tidak hanya menunjukkan kepentingan nasional Hongaria dalam bidang energi, tetapi juga kedekatan politiknya dengan Kremlin, yang melihat Hongaria sebagai celah yang melemahkan persatuan internal Uni Eropa (Frantzman, 2022). Pemerintah Orban mengkritik kebijakan sanksi Uni Eropa karena dua alasan utama: dampaknya yang tidak proporsional terhadap perekonomian dan dianggap melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Menurut laporan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (2025), sanksi putaran ke-16 yang menargetkan industri

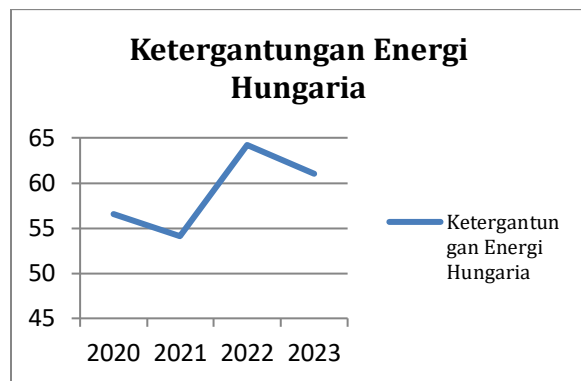
aluminium Rusia mengancam akan menghancurkan sekitar 20.000 pekerjaan di Jerman dan mengganggu industri otomotif Hongaria (Spike, 2024). Orbán berpendapat bahwa sanksi-sanksi tersebut telah gagal mencapai tujuan politik utama mereka untuk menghentikan perang dan malah memperburuk daya saing ekonomi Eropa (Bondarieva, 2025). Selain itu, Orbán juga menyoroti proses pengambilan keputusan di tingkat Uni Eropa, yang menurutnya kurang inklusif dan tidak mempertimbangkan aspirasi warga negara. Pada bulan Oktober, pemerintah Hongaria mengadakan ‘jajak pendapat nasional’ untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai sanksi. Meskipun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dianggap bias, hasilnya menunjukkan bahwa 90 persen peserta menentang sanksi (Fazekas, 2022). Orbán kemudian menggunakan hasil tersebut untuk memperkuat narasi bahwa Uni Eropa didominasi oleh elit birokrat yang tidak berhubungan dengan rakyat, sementara Hongaria menampilkan dirinya sebagai negara yang mempertahankan kedaulatan nasionalnya terhadap campur tangan asing. Narasi ini sejalan dengan gaya populis dan nasionalis Orbán (Frantzman, 2022). Orbán telah menggunakan penolakan terhadap sanksi Uni Eropa sebagai strategi politik untuk meningkatkan dukungan domestiknya. Partai Fidesz yang dipimpinnya menggunakan isu ini sebagai alat mobilisasi, terutama terhadap pemilih konservatif dan nasionalis. Dalam kampanye pemilihan Parlemen Eropa 2024, Orbán menuduh oposisi sebagai “boneka Brussels” yang mendukung kebijakan pro-perang. Taktik ini terbukti efektif, terutama di daerah pedesaan, di mana 68 persen pemilih mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan sanksi tersebut dan mendukung hasil pemilu (Fazekas, 2022).

Kampanye ini juga didukung oleh kerja sama dengan gereja-gereja dan kelompok-kelompok tradisional yang melihat Rusia sebagai simbol nilai-nilai konservatif. Selain itu, Orbán memanfaatkan ketidakpuasan publik terhadap inflasi yang tinggi, dengan menyalahkan sanksi Uni Eropa sebagai penyebab utama tingginya harga energi dan komoditas (Thorburn, 2024). Meskipun Hongaria mengalami resesi teknis pada tahun 2024, Orbán berhasil mempertahankan popularitasnya. Orbán berhasil mempertahankan popularitasnya dengan menciptakan argumen bahwa “Brussel yang serakah” adalah akar penyebab krisis ekonomi di negaranya (Novaya,

2025). Kebijakan luar negeri Orbán memiliki dua konsekuensi serius bagi Uni Eropa: menurunnya solidaritas trans-Atlantik dan kesempatan bagi Rusia untuk menembus dinamika politik Eropa. Menurut FOI 8659 (2024), Hongaria sengaja memblokir kerja sama militer antara UE dan Ukraina untuk meningkatkan daya tawar internasionalnya (Thorburn, 2024). Bahkan pada Maret 2025, Orbán menunda keputusan untuk memperpanjang sanksi untuk menunggu orientasi politik Donald Trump, yang mengindikasikan bahwa Hongaria lebih memilih Washington daripada Brussels (Novaya, 2025).

Pada saat yang sama, Rusia menggunakan posisi Hongaria sebagai alat propaganda untuk merusak persatuan di Uni Eropa. Media pemerintah Rusia, seperti TASS, secara teratur menekankan bahwa penolakan Orbán membuktikan kegagalan strategi anti-Rusia Uni Eropa (Frantzman, 2022). Meskipun demikian, Hongaria telah menyetujui perpanjangan sanksi secara berkala, terutama setelah mendapatkan beberapa konsesi – misalnya, pengecualian untuk proyek nuklir Paks 2 milik Rosatom. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Orbán dimotivasi oleh pertimbangan taktis dan bukannya komitmen ideologis sepenuhnya (Fazekas, 2022).

Ketergantungan Energi Hungaria terhadap Rusia



Gambar 1. Grafik Ketergantungan Energi Hungaria
Sumber: Központi Statisztikai Hivatal & Statista

Karena produksi energi dalam negeri yang rendah, Hungaria sangat bergantung pada impor energi untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Hal ini tercermin dalam data grafik diatas. Pada tahun 2020, tingkat ketergantungan energi Hungaria berada di sekitar 56,6%. Artinya, lebih dari setengah kebutuhannya dipenuhi dari luar negeri. Namun, pada tahun 2021, angka

ini menurun sedikit menjadi sekitar 54,1%, yang mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat pasokan domestik atau diversifikasi sumber energi.

Namun, tren ini tidak bertahan lama. Di tahun 2022, ketergantungan energi Hungaria melonjak drastis hingga mencapai 64,2%. Kenaikan tajam ini bisa dikaitkan dengan situasi konflik Rusia-Ukraina yang memengaruhi pasar energi Eropa secara luas serta ketidakmampuan Hungaria untuk cepat beradaptasi dengan krisis energi.

Pada tahun 2023, tingkat ketergantungan kembali sedikit menurun ke angka 61%, namun masih lebih tinggi dibanding dua tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada usaha pengurangan ketergantungan, Hungaria masih belum mampu lepas dari dominasi energi impor.

Hungaria adalah salah satu negara yang memiliki ketergantungan pada energi, dalam hal ini Hungaria sangat bergantung pada pasokan energinya yaitu dari negara Rusia, oleh karena hal ini Hungaria menerima konsekuensi dengan dinilai menjadi negara yang pro dengan Rusia dan juga pro dengan tindakan Rusia yang memerangi Ukraina. Hungaria menerima pasokan energi ke negaranya melalui pipa, oleh karena itu Hungaria lebih mudah mengakses energi tersebut dari negara Rusia. Jika ingin memasok dari negara lain, biaya dan waktu yang dibutuhkan lebih banyak karena butuh untuk membangun kembali infrastruktur. Jika ingin memasok dengan menggunakan transportasi laut, biaya yang dibutuhkan akan lebih banyak karena Hungaria tidak mempunyai kawasan laut. Apabila Hungaria kehilangan pasokan energinya dari Rusia, maka hal ini akan memberikan masalah yang cukup kompleks terhadap keamanan energi Hungaria.

Hungaria terus membeli minyak dan gas Rusia senilai miliaran dolar setiap tahunnya, meskipun sebagian besar negara Barat lainnya memutuskan hubungan ekonomi dengan Rusia setelah invasinya ke Ukraina pada bulan Februari 2022. Cabang selatan jalur pipa Druzhba atau "Persahabatan" membawa ribuan metrik ton minyak Rusia melintasi Ukraina dan langsung ke kilang MOL yang dikendalikan negara di pinggiran Budapest (Ibu kota Hungaria) setiap hari. Rusia pernah menjadi pemasok energi terbesar Uni Eropa, tetapi blok tersebut melarang impor minyak Rusia setelah invasi Ukraina. Namun, Hungaria, Slowakia, dan Republik Ceko menuntut pengecualian, dengan alasan bahwa sebagai

negara yang terkurung daratan, mereka tidak dapat dengan cepat mendiversifikasi pasokan. Sementara Slowakia dan Republik Ceko berupaya mengurangi ketergantungan pada energi Rusia sejak larangan tersebut diberlakukan, Hungaria telah membuat kesepakatan istimewa baru untuk meningkatkan pasokan dari Rusia. Kini, Hungaria menjadi pelanggan energi terbesar Moskow di UE, dengan membeli minyak dan gas senilai \$343 juta pada bulan Januari tahun 2024. Hungaria juga tengah membangun jaringan pipa baru untuk menyalurkan produk minyak Rusia ke Serbia. Selain itu, Rusia sedang membangun pembangkit listrik tenaga nuklir Paks II baru di Hongaria, di tepi Sungai Danube, selatan Budapest (Ridgwell, 2024).

Hungaria akan kehilangan pasokan energinya jika tidak menolak sanksi yang diberikan kepada Rusia. Jika Hungaria kehilangan pasokan energi, maka negara tersebut akan mengalami krisis hingga resesi ekonomi. Hal ini merupakan keadaan yang dihindari oleh Hungaria dengan melakukan penolakan sanksi energi tersebut (Ramadhani, 2017). Segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setiap hari telah dimanjakan dengan memanfaatkan energi yang ada, contohnya transportasi, kegiatan dalam rumah tangga, pertanian, industri, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, jika pasokan energi mengalami kelangkaan dikarenakan hilangnya sumber energi dari Rusia, hal ini akan mempengaruhi banyak sektor, termasuk harga pangan, barang, dan jasa. Keputusan Hungaria untuk menolak langkah-langkah tertentu berasal dari kebutuhannya untuk memastikan stabilitas pasokan energinya. Sebagai negara dengan sumber daya terbatas untuk mengakses dan mengamankan energi, Hungaria telah mengambil sikap tegas untuk menolak sanksi. Hal ini sebagian besar karena Hungaria mendapatkan keuntungan dari akses yang mudah dan terjangkau ke energi Rusia. Menurut IEA, keamanan energi berarti memiliki pasokan energi yang dapat diandalkan dan berkelanjutan dengan biaya yang masuk akal, yang selaras dengan prioritas Hungaria.

Produksi energi domestik Hungaria tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan negara, sehingga negara ini mengandalkan impor energi. Hal ini merupakan bagian dari strategi Hungaria untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan energi domestiknya dan menjaga keamanan energi. Akibatnya, Hungaria dianggap sebagai negara yang bergantung pada energi, sangat bergantung pada sumber energi

asing, terutama dari Rusia. Misalnya, Hungaria mengimpor batu bara karena hanya dapat memproduksi jenis energi yang terbatas di dalam negeri. Menurut data dari IEA, Hungaria hanya memproduksi lignit, atau batu bara muda, sejak tahun 1993. Namun, hingga tahun 2020, negara ini telah menggunakan berbagai jenis batu bara, termasuk kokas oven, BKB, gas oven kokas, batu bara bitumen lainnya, ter batu bara, dan Antrasit (Hungary, 2022).

Hungaria juga mengandalkan impor gas alam untuk memenuhi kebutuhannya. Antara tahun 2016 dan 2020, konsumsi gas alam rata-rata negara ini cukup tinggi, mencapai 284.483,2 TJ. Namun, produksi gas alam domestik Hungaria telah menurun selama bertahun-tahun, dengan output rata-rata hanya 64.711,2 TJ-gross. Tingkat produksi yang rendah ini berarti Hungaria tidak dapat memenuhi permintaan gas alamnya yang tinggi dengan sendirinya, sehingga impor menjadi satu-satunya solusi yang tepat. Meskipun impor gas alam berfluktuasi, data terbaru dari tahun 2020 menunjukkan sedikit penurunan, tetapi volumenya tetap besar, dengan rata-rata 509.642,8 TJ-berat dari tahun 2016 hingga 2020. Rusia memainkan peran sentral dalam pasokan gas alam Hungaria, menyediakan 85% dari kebutuhan negara tersebut. Data dari tahun 2000 hingga 2020 menegaskan dominasi Rusia dalam impor gas alam Hungaria. Ketergantungan yang besar pada gas Rusia, sebesar 85%, adalah alasan utama di balik penentangan kuat Hungaria terhadap sanksi terhadap energi Rusia (Than, 2022).

Selain impor batu bara dan gas alam, Hungaria juga mengimpor minyak bumi seperti bensin, bahan bakar diesel dan minyak panas, bahan bakar jet, dan juga nuklir dari banyak negara. Melalui penjelasan ini, jelas bahwa energi memainkan peran penting dalam mendukung hampir setiap aspek kehidupan warga Hongaria. Hongaria adalah salah satu negara yang sangat bergantung pada ketersediaan energi untuk memastikan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini terlihat dari angka-angka yang terkait dengan konsumsi energi Hongaria. Data produksi menunjukkan berapa banyak energi yang dapat dihasilkan Hongaria secara domestik untuk memenuhi kebutuhannya, dan angka-angka tersebut menunjukkan bahwa produksi dalam negeri masih relatif rendah, tidak mencukupi kebutuhan yang tinggi. Di sisi lain, data impor menyoroti kerentanan Hongaria dalam hal keamanan energi, karena negara ini sangat

bergantung pada impor energi dari negara lain. Rusia, khususnya, menonjol sebagai salah satu pemasok energi terbesar Hongaria, menggarisbawahi ketergantungan negara ini pada sumber-sumber eksternal untuk menopang kebutuhan energinya.

Keuntungan Ekonomi dan Politik

Ketergantungan ekonomi yang asimetris antara Hongaria dan Rusia merupakan alasan utama di balik kebijakan luar negeri Hongaria (Deák & Weiner, 2019). Pemerintah Hongaria juga memiliki pandangan yang sama, dengan alasan bahwa menyetujui sanksi terhadap energi Rusia akan menjadi pukulan besar bagi ekonomi dan mata pencaharian Hongaria, bahkan mengancam keamanan energi negara tersebut (Jack & Gavin, 2024). Sekitar pertengahan tahun 2000-an, didorong oleh ambisi "membuka diri ke Timur," Hongaria berinvestasi besar-besaran dalam hubungan energinya dengan Rusia. Saat ini, negara tersebut mengimpor gas, minyak, dan teknologi nuklir dari Rusia. Selama lebih dari satu dekade, aktor-aktor terkait Rusia telah mendominasi sektor energi Hongaria, menghambat pengembangan sumber energi alternatif (Deák and Weiner, 2019). Dua motif mendasari perkembangan ini. Pertama, pemerintah Fidesz menjadikan energi murah untuk rumah tangga sebagai prioritas utama. Kebijakan ini dihargai oleh para pemilih, yang berkontribusi pada terpilihnya kembali Fidesz pada tahun 2014 dan 2018. Kedua, diversifikasi hubungan perdagangan di luar mitra Barat merupakan tujuan eksplisit Fidesz, yang terkait dengan gagasan kebijakan luar negeri yang pragmatis. Energi Rusia memainkan peran kunci dalam kebijakan ini (Varga & Buzogány, 2020).

Hubungan baik antara Hongaria dan Rusia telah memberikan sejumlah keuntungan ekonomi dan politik bagi Hongaria, terutama dalam hal energi, investasi, dan kebijakan luar negeri yang pragmatis. Hubungan ini telah berkembang sejak pertengahan tahun 2000-an, ketika Hongaria mulai mengadopsi kebijakan "membuka diri ke Timur" (Opening to the East), yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada mitra Barat dan memperluas kerjasama dengan negara-negara di luar Uni Eropa, termasuk Rusia. Salah satu keuntungan ekonomi utama yang diperoleh Hongaria dari hubungan baik dengan Rusia adalah akses ke pasokan energi yang stabil dan relatif murah. Salah satu keuntungan paling signifikan yang diperoleh Hongaria dari

hubungannya dengan Rusia terletak pada sektor energi. Hongaria sangat bergantung pada impor energi dari Rusia, khususnya gas alam dan minyak. Pada tahun 2021, Hongaria memperoleh perjanjian jangka panjang dengan Gazprom untuk mengimpor 4,5 miliar meter kubik gas per tahun, angka yang kemudian ditingkatkan menjadi 6,7 miliar meter kubik pada tahun 2024. Hal ini menjadikan Hongaria salah satu importir gas Rusia terbesar di Eropa. Selain memenuhi kebutuhan energi domestik, Hongaria juga berfungsi sebagai pusat transit gas utama di Eropa Tengah, yang menangani volume transit hingga 17 miliar meter kubik tahun lalu. Peran ini menghasilkan manfaat ekonomi yang substansial bagi perusahaan energi lokal, dengan pendapatan tahunan diperkirakan mencapai €500-600 juta (Balkan Insight, 2024).

Selain gas, proyek nuklir Paks II juga merupakan kerjasama ekonomi antara Hongaria dan Rusia. Proyek ini melibatkan pembangunan dua reaktor VVER-1200 oleh Rosatom, dengan kapasitas gabungan sebesar 2400 MW. Proyek senilai €10 miliar tersebut sebagian besar dibiayai melalui pinjaman dari bank-bank Rusia dan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi listrik Hongaria secara signifikan. Saat ini, pembangkit listrik tenaga nuklir Paks memasok sekitar 40% listrik Hongaria (Gizińska & Sadecki, 2023). Dengan penambahan reaktor baru, Hongaria akan memiliki sumber energi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Investasi bilateral antara kedua negara juga mengalami pertumbuhan. Pada kuartal pertama tahun 2024, investasi bersama oleh perusahaan-perusahaan Rusia dan Hongaria meningkat sebesar 6%, meskipun ada tekanan eksternal pada hubungan ekonomi mereka (Tass, 2024). Hal ini menunjukkan ketahanan kerja sama ekonomi antara kedua negara, bahkan di tengah tantangan geopolitik.

Secara politik, hubungan Hongaria yang kuat dengan Rusia memberinya pengaruh yang signifikan dalam negosiasi internasional, khususnya di dalam Uni Eropa. Sikap Hongaria yang pro-Rusia memungkinkannya untuk memainkan "kartu Rusia" dalam diskusi dengan Brussels, khususnya mengenai kebijakan energi dan sanksi terhadap Moskow (Brzozowski & Kozlov, 2024). Posisi ini memungkinkan Hongaria untuk menegaskan kedaulatannya dalam pengambilan keputusan, mengurangi kerentanannya terhadap tekanan supranasional dari UE. Hongaria juga menggunakan hubungan ini untuk memperkuat narasi nasionalisnya, yang

menjadi inti kebijakan dalam negerinya. Perdana Menteri Viktor Orbán sering kali menggunakan tema sejarah dan identitas nasional untuk membenarkan kebijakan luar negeri yang lebih mengutamakan hubungan yang lebih erat dengan Rusia. Misalnya, ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan nasional daripada mematuhi kebijakan kolektif UE, yang menurutnya dapat mengancam identitas nasional Hongaria (Lansing, 2025). Pendekatan ini membantu Orbán mempertahankan dukungan politik dalam negeri sekaligus memposisikan Hongaria sebagai aktor independen di panggung internasional. Lebih jauh lagi, hubungan dekat Hongaria dengan Rusia memberinya pengaruh diplomatik yang lebih besar pada isu-isu global. Rusia sering kali mendukung kebijakan Hongaria yang menyimpang dari arus utama UE. Misalnya, sementara UE menganjurkan diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan pada energi Rusia, Hongaria telah meningkatkan impor gas dan minyaknya dari Rusia. Sikap ini memberi Hongaria suara yang unik dalam diskusi energi regional.

Terlepas dari manfaatnya, hubungan Hongaria dengan Rusia bukannya tanpa kritik. Baik Uni Eropa maupun NATO memandang sikap pro-Rusia Hongaria sebagai ancaman potensial bagi persatuan blok tersebut. Beberapa pihak bahkan menuduh Hongaria bertindak sebagai "Kuda Troya" bagi Rusia, yang melemahkan solidaritas Eropa dalam menghadapi strategi geopolitik Rusia. Kebijakan Orbán sering dianggap melemahkan upaya kolektif untuk memperkuat pertahanan dan keamanan transatlantik. Selain itu, ketergantungan Hongaria pada energi Rusia membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga dan potensi tekanan politik dari Moskow. Meskipun alternatif, seperti mengimpor gas dari Azerbaijan atau Turki, tersedia, pemerintah Hongaria menganggap biaya diversifikasi terlalu tinggi. Hal ini menciptakan dilema strategis bagi Hongaria, yang menyeimbangkan kebutuhan akan pasokan energi yang terjangkau dengan keinginan untuk mempertahankan otonomi politik. Hubungan Hongaria yang kuat dengan Rusia membawa manfaat ekonomi yang signifikan, termasuk pasokan energi yang stabil, pendapatan dari transit gas, dan meningkatnya investasi bilateral. Secara politis, hal ini meningkatkan daya tawar Hongaria di panggung internasional dan mendukung narasi nasionalis domestiknya. Namun, hubungan ini juga membawa risiko geopolitik, yang berpotensi merusak solidaritas

Uni Eropa dan NATO serta meningkatkan ketergantungan ekonomi Hongaria pada Rusia. Dengan pendekatan pragmatisnya, pemerintahan Orbán kemungkinan akan terus memprioritaskan keuntungan jangka pendek, meskipun menghadapi kritik dari mitra internasional. Hubungan ini mencerminkan strategi politik, di mana Hongaria memprioritaskan kepentingan nasionalnya di atas komitmen kolektif regional atau global.

Implikasi Kebijakan Terhadap Hubungan Hongaria Dengan UE

Penentangan keras Hongaria terhadap sanksi terhadap Rusia telah menyebabkan ketegangan struktural yang berkelanjutan dengan Uni Eropa (UE). Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, UE telah menerapkan 13 putaran sanksi ekonomi terhadap Rusia. Namun, Hongaria tetap menjadi satu-satunya negara anggota yang secara terbuka menentang tindakan ini. Penentangan ini terutama terlihat di sektor energi, karena Hongaria mendapatkan 85% gas alamnya dan 65% minyak mentahnya dari Rusia. Pada bulan Februari 2023, Perdana Menteri Viktor Orbán menegaskan kembali sikap Hongaria dengan berjanji untuk memveto sanksi UE yang ditujukan pada sektor energi nuklir Rusia. Keputusannya sebagian besar didorong oleh proyek pembangkit listrik tenaga nuklir Paks II senilai €10 miliar, yang didanai oleh perusahaan Rusia Rosatom (Euractiv, 2023). Posisi ini secara langsung bertentangan dengan strategi UE yang lebih luas untuk mengurangi ketergantungannya pada energi Rusia, dengan rencana untuk memangkas impor gas alam blok tersebut dari 40% menjadi 15% pada tahun 2024 (Orel dkk, 2023).

Konflik semakin memanas ketika Uni Eropa menahan dana sebesar €15,4 miliar dari Hongaria karena kekhawatiran atas reformasi hukum yang belum ditangani dan masalah korupsi. Komisi Eropa berpendapat bahwa kebijakan Perdana Menteri Orbán merusak supremasi hukum, sementara pemerintah Hongaria membingkai situasi tersebut sebagai masalah "kedaulatan nasional," menuduh UE terlibat dalam "pemerasan politik." Analisis tahun 2024 oleh Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri mengungkapkan bahwa 68% warga Hongaria mendukung penolakan pemerintah terhadap sanksi, sebuah faktor yang dimanfaatkan Orbán untuk mengonsolidasikan legitimasi domestiknya. Akan tetapi, ketegangan yang terus

berlanjut ini membahayakan peran Hungaria dalam proses pengambilan keputusan UE, karena negara tersebut menghadapi potensi hilangnya hak suaranya di Dewan Eropa berdasarkan Pasal 7 Perjanjian UE.

Kebijakan Hungaria mengubah lanskap geopolitik Eropa Timur secara signifikan dengan memberi Rusia pijakan strategis di kawasan tersebut. Menurut analisis tahun 2025 oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional, Hungaria menyumbang 42% investasi Rusia di Eropa Tengah dan Timur (CEE), khususnya di sektor energi, perbankan, dan teknologi (Atamanenko & Konopka, 2022). Moskow telah memanfaatkan hubungannya dengan Budapest sebagai jalur alternatif untuk menghindari sanksi Barat, dibuktikan dengan peningkatan 17% dalam transaksi gas Hungaria-Rusia pada tahun 2024, meskipun konflik di Ukraina masih berlangsung (Golubkin dkk, 2023). Konsekuensi paling signifikan dari sikap Hungaria adalah fragmentasi Grup Visegrád, yang terdiri dari Polandia, Hungaria, Republik Ceko, dan Slowakia. Sementara Polandia telah muncul sebagai salah satu sekutu terkuat Ukraina, menyumbang €3,1 miliar dalam bentuk bantuan militer, Hungaria telah secara aktif menghalangi upaya Barat dengan mencegah pengiriman senjata melewati wilayahnya dan menolak memberikan pelatihan bagi pasukan Ukraina (Vidnianskyi, 2024). Sebuah laporan tahun 2025 oleh Institut Penelitian Keamanan NATO menunjukkan bahwa kebijakan Hungaria telah melemahkan efektivitas sanksi Barat di kawasan Eropa Tengah dan Timur (CEE), mengurangi dampaknya sekitar 12-15% (Golubkin dkk, 2023).

Rusia telah memanfaatkan posisi geopolitik Hungaria untuk memperluas pengaruhnya melalui "diplomasi vaksin" dan investasi strategis. Pada tahun 2023, Hungaria menjadi pusat distribusi utama Rusia untuk vaksin Sputnik V, memasok 78% dosis yang dikirim ke Balkan (Atamanenko & Konopka, 2022). Lebih jauh, kerja sama intelijen antara Budapest dan Moskow telah meningkat secara signifikan, dengan peningkatan 300% sejak tahun 2022, sebagaimana dilaporkan oleh Bellingcat (2025). Kolaborasi ini mencakup pertukaran data tentang pengungsi Ukraina, yang menimbulkan kekhawatiran atas keamanan dan kedaulatan di dalam Uni Eropa. Dalam pidato Kenegaraan 2023, Orbán menekankan pendekatan ini dengan menyatakan, "Hungaria harus menjadi jangkar yang realistis di lautan idealisme UE," yang

menggarisbawahi pandangannya bahwa kepentingan nasional harus didahulukan daripada komitmen ideologis (Haas, 2023). Sementara sanksi Uni Eropa menyebabkan penurunan 22% dalam perdagangan mesin industri di kawasan Eropa Tengah dan Timur (CEE), Hungaria mengalami peningkatan 7% dalam ekspor komponen otomotif ke Rusia pada tahun 2024, yang difasilitasi melalui pengaturan perdagangan segitiga dengan Serbia (Orel dkk, 2023).

Sebuah studi tahun 2024 oleh Center for European Democratization menemukan bahwa 34% anggota parlemen Hungaria memiliki kepentingan finansial langsung di perusahaan-perusahaan Rusia. Selain itu, ketergantungan Hungaria yang besar pada energi Rusia—mencapai 93% untuk gas alam pada tahun 2024—memperlihatkan kerentanan struktural pada kemandirian nasional (Orel dkk, 2023). Kebijakan Orbán telah memprioritaskan keuntungan ekonomi jangka pendek dengan mengorbankan otonomi strategis. Analisis Bank Dunia tahun 2025 memperkirakan bahwa sanksi Uni Eropa telah mengakibatkan kerugian sebesar €6,2 miliar bagi ekonomi Hungaria, sementara subsidi energi tahunan Rusia sebesar €4,1 miliar menopang ketergantungan Budapest pada Moskow (Joy, 2024). Pada tataran praktis, kebijakan Hungaria telah mengubah paradigma keamanan Eropa. Sebuah laporan tahun 2025 oleh RAND Corporation memproyeksikan bahwa jika tiga negara anggota UE lainnya mengadopsi sikap Hungaria, efektivitas sanksi terhadap Rusia akan menurun hingga di bawah 40%. Sementara itu, kemampuan Rusia untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,1% pada tahun 2024 meskipun ada sanksi meningkatkan daya tarik kerja sama ekonomi dengan Moskow bagi negara-negara Eropa Tengah dan Timur (CEE) yang tetap skeptis terhadap UE.

V. KESIMPULAN

Ketergantungan Hungaria pada energi Rusia telah mendorong penolakannya yang konsisten terhadap semua sanksi Uni Eropa yang menargetkan sumber daya energi Rusia. Dari sudut pandang pejabat Hungaria, sanksi tersebut menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan energi negara tersebut. Pernyataan resmi dari pemerintah Hungaria menekankan bahwa ketergantungan energi dan masalah keamanan merupakan alasan utama di balik penentangan Budapest terhadap tindakan ini.

Akibatnya, Hungaria ragu-ragu untuk memberlakukan sanksi dan secara aktif mencari pengecualian untuk sektor energinya sendiri. Dalam konteks ini, mempertahankan kerja sama dengan Rusia dianggap lebih bermanfaat bagi Hungaria daripada menyelaraskan diri dengan konsensus Uni Eropa tentang sanksi terhadap Rusia.

Keputusan Hungaria untuk menolak sanksi Uni Eropa terhadap energi Rusia didorong oleh perhitungan rasional. Pemerintah Hungaria mengevaluasi potensi konsekuensi dari penerimaan dan penolakan sanksi tersebut. Menurut pandangan Hungaria, penerapan sanksi energi akan membahayakan keamanan energi negara tersebut dengan membatasi akses ke pasokan penting. Hal ini, pada gilirannya, dapat memicu krisis energi, yang ditandai dengan kekurangan parah yang mengganggu sektor ekonomi, yang berpotensi menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan resesi. Kemerosotan ekonomi dalam skala ini akan berdampak negatif pada mata pencaharian dan ketahanan pangan. Selain itu, pemulihan dari krisis sebesar ini akan membutuhkan waktu yang signifikan dan upaya yang besar untuk memulihkan stabilitas.

Hubungan Hungaria yang kuat dengan Rusia membawa manfaat ekonomi yang signifikan, termasuk pasokan energi yang stabil, pendapatan dari transit gas, dan meningkatnya investasi bilateral. Secara politis, hal ini meningkatkan daya tawar Hungaria di panggung internasional dan mendukung narasi nasionalis domestiknya. Namun, hubungan ini juga membawa risiko geopolitik, yang berpotensi merusak solidaritas Uni Eropa dan NATO serta meningkatkan ketergantungan ekonomi Hungaria pada Rusia. Dengan pendekatan pragmatisnya, pemerintahan Orbán kemungkinan akan terus memprioritaskan keuntungan jangka pendek, meskipun menghadapi kritik dari mitra internasional. Hubungan ini mencerminkan strategi politik, di mana Hungaria memprioritaskan kepentingan nasionalnya di atas komitmen kolektif regional atau global.

REFERENSI

- [1] Asrudin, A. (2014). Thomas Kuhn dan teori hubungan internasional: realisme sebagai paradigma. *Global South Review*, 1(2), 107-122.
- [2] Atamanenko, A., & Konopka, N. (2022). Russia's and China's Vaccine Diplomacy

- in Central and Eastern Europe. *Political and Legal Studies*, vol 1(1), 7-13.
- [3] Balkan Insight. (2024). Hungary Turns Itself into Hub for Russian Gas. <https://balkaninsight.com/2024/12/11/hungary-turns-itself-into-hub-for-russian-gas/>
- [4] Berglund, S., & Karasimeonov, G. (2019). In the EU and NATO but Close to Russia — Post-Crimea Attitudes in Bulgaria and Hungary. *Polish Political Science Review*, 7(2), 1-18. <https://doi.org/10.2478/ppsr-2019-0010>
- [5] Bondarieva, K. (2025). Orbán laments that sanctions against Russia “destroyed EU competitiveness”. *European Pravda*. <https://www.eurointegration.com.ua/english/news/2025/01/22/7203079/>
- [6] Brzozowski, A., & Kozlov, P. (2024). Hungary's ties to Russia make Europeans “increasingly uncomfortable.” *Euractiv*. <https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/hungarys-ties-to-russia-make-europeans-increasingly-uncomfortable/>
- [7] Drohozyuk, M. (2024). Hungary's Foreign Policy Orientation at the Beginning of the Russian-Ukrainian War as a Factor in the New Crisis of the Visegrad Group. *Analytics, Forecasts, Information Management*, 15, 109-122. <https://doi.org/10.31861/mediaforum.2024.15.109-122>
- [8] Éltető, A., & Szemlér, T. (2023). Hungary in the European Union – Cooperation, Peacock dance and autocracy. *Comparative Southeast European Studies*, 71(3), 272-299. <https://doi.org/10.1515/soeu-2022-0051>
- [9] European Council and Council of the European Union. (2025). EU sanctions against Russia. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-russia/>
- [10] Deák, A., & Weiner, C. (2019). “Hungary: Leveraging political influence,” in *The Russian Economic Grip on Central and Eastern Europe* eds. Ognian Shentov, Ruslan Stefanov and Martin Vladimirov. Abingdon – New York: Routledge. Tarrósy and Vörös. “Hungary's Pragmatic Foreign Policy in a Post-American World.”
- [11] Euractiv. (2023). Hungary's Orbán vows to maintain Russia ties. <https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/hungarys-orban-vows-to-maintain-russia-ties/>

- [12] Fazekas, P. (2022). Viktor Orbán's Anti-Sanctions Campaign Sparks Fears of EU Disunity on Russia. *Eurasia Daily Monitor*, 19(163).
- [13] Frantzman, S. J. (2022). Russia hopes to use Hungary to oppose Western sanctions – analysis. *The Jerusalem Post*.
<https://www.jpost.com/international/article-718237>
- [14] Gizińska, I., & Sadecki, A. (2023). Russia's nuclear project in Hungary: France's growing role. *OSW Commentary*.
<https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2023-07-04/russias-nuclear-project-hungary-frances-growing-role>
- [15] Golubkin, A. V., Malyutina, O., Chernetskii, F. (2023). Impact of EU sanctions on trade in engineering products between Russia and Central-Eastern European countries: An applied econometric approach. *Economics and Management*, vol 29(10), 1190-1197.
- [16] Haas, D. (2023). Understanding Hungarian foreign policy. *Emerging Europe*.
<https://emerging-europe.com/analysis/understanding-hungarian-foreign-policy/>
- [17] Hegedüs, D. (2016). The Kremlin's Influence in Hungary—Are Russian Vested Interests Wearing Hungarian National Colors?. *DGAPkompakt*, 8, 1-11.
- [18] International Energy Agency. (2022). Hungary Oil Security Policy.
<https://www.iea.org/articles/hungary-oil-security-policy>
- [19] International Energy Agency. (2022). Hungary.
<https://www.iea.org/countries/hungary>
- [20] Ivanović, J., Vincze, O., Jevtić, M., Szabó, Z., Csertó, I., Choi, S. Y., & Liu, J. H. (2024). Between east and west, between past and future: The effects of exclusive historical victimhood on geopolitical attitudes in Hungary and Serbia. *British Journal of Social Psychology*, 64(1).
<https://doi.org/10.1111/bjso.12825>
- [21] Jack, V., & Gavin, G. (2024). Hungary facing fuel crisis as Ukraine turns up heat on Russian oil supplies. *POLITICO*.
<https://www.politico.eu/article/hungary-fuel-crisis-ukraine-sanctions-russian-oil-imports-lukoil-central-europe/>
- [22] Joy, M. (2024). How Does Russia Avoid the Economic Impacts of Western Sanctions?.
<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1870725/FULLTEXT02.pdf>
- [23] Józwiak, V. (2021). Hungary's Relations with Russia. *Polish Institute of International Affairs*.
<https://www.pism.pl/publications/hungarys-relations-with-russia>
- [24] Központi Statisztikai Hivatal. (2022). Fenntartható fejlődés indikátorai. <https://ksh.hu/s/kiadvanyok/fenntarthato-fejlodes-indikatorai-2023/3-22>
- [25] Landsbergis, G. (2025). Suspend Hungary's Voting Rights to Save the EU's Credibility. *Carnegie Europe*.
<https://carnegieendowment.org/europe/strategic-europe/2025/02/suspend-hungarys-voting-rights-to-save-the-eus-credibility?lang=en>
- [26] Lansing, R. (2025). Hungary: Trojan Horse in Russia's Proxy War Against Europe. *Lansing Institute*.
<https://lansinginstitute.org/2025/03/07/hungary-trojan-horse-in-russias-proxy-war-against-europe/>
- [27] Martin, A., & Al Farizi, S. (2024). Sikap Uni Eropa Terhadap Konflik Rusia dan Ukraina. *Jurnal Kajian Hubungan Internasional*, 3(1), 42-65.
- [28] Massaguni, M., Badu, M. N., & Sallatu, M. A. (2022). Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(1), 43-67.
- [29] Novaya Gazeta Europe. (2025). EU renews sanctions on Russia after being held to ransom by Hungary's Orbán.
<https://novayagazeta.eu/articles/2025/03/15/eu-renews-sanctions-on-russia-after-being-held-to-ransom-by-hungarys-orban-en-news>
- [30] Orel, O., Orel, O., Yatskivska, A., & Vlasenko, O. (2023). EU economic sanctions against russia and the effectiveness of their application. *Society and Security*, 1(1), 166-174.
[https://doi.org/10.26642/sas-2023-1\(1\)-166-174](https://doi.org/10.26642/sas-2023-1(1)-166-174).
- [31] Ramadhani, A. (2017). Evolusi Konsep Keamanan Energi. *Jurnal Politik Internasional*, 19(2).
<https://doi.org/10.7454/global.v19i2.307>
- [32] Ridgwell, H. (2024). Hungary Appears to Be Strengthening Ties With Russia, China.
<https://www.voanews.com/a/hungary-appears-to-be-strengthening-ties-with-russia-china/7499682.html>
- [33] Sahir, S. H. (2021). Metodologi penelitian. Penerbit KBM Indonesia.
- [34] Spike, J. (2024). Hungary's Orban says

- sanctions on Russia will ‘destroy’ EU economy. The Washington Times. <https://www.washingtontimes.com/news/2024/nov/22/hungary-viktor-orban-says-sanctions-russia-destroy/>
- [35] Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2023). Political Realism in International Relations. <https://plato.stanford.edu/entries/realism-intl-relations/#Neor>
- [36] Statista. (2024). Energy dependency rate in Hungary from 2010 to 2023. <https://www.statista.com/statistics/1361350/hungary-energy-dependency-rate/>
- [37] Tass. (2024). Mutual investments between Hungary, Russia gain 6% in first quarter of this year. <https://tass.com/economy/1880913>
- [38] Than, K. (2022, July 23). Orban urges new EU strategy on Ukraine, says sanctions have failed. Reuters. <https://www.reuters.com/world/europe/hungarys-orban-calls-new-eu-strategyukraine-war-says-sanctions-failed-2022-07-23/>
- [39] Thorburn, E. (2024). Beyond “Russia-Friendly” Hungary’s Foreign Policy Rationales. Northern European and Transatlantic Security (NOTS). FOI Memo 8659: Hungary’s divergence from its Western allies
- [40] Varga, M., & Buzogány, A. (2020). The Foreign Policy of Populists in Power: Contesting Liberalism in Poland and Hungary. *Geopolitics* 26(5).
- [41] Vidnianskyi, S. (2024). ‘This Is Not Our War’: The Position of Hungary on Russia’s War against Ukraine and Its Impact on Regional Security. *Political Science, History*. DOI:10.37837/2707-7683-2024-28